



**PAPARAN** - Bupati Ketapang Martin Rantan SH MSos memaparkan rencana pembangunan prioritas pada Musrenbang Tahun 2021.

## Martin Prioritaskan Jl Tumbang Titi hingga Manis Mata

### ■ Musrenbang Kabupaten Tahun 2021

**KETAPANG, TRIBUN** - Bupati Ketapang Martin Rantan memaparkan rencana pembangunan prioritas pada Musrenbang tahun 2021 yang digelar di Ballroom Borneo Hotel Emerald, Sabtu (14/03).

"Pada kesempatan ini perlu disampaikan bahwa tahun 2021 ada beberapa program prioritas Pemkab Ketapang yang diharapkan menjadi prioritas dan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kalbar," kata Martin saat membuka Musrenbang.

Sejumlah pembangunan prioritas yang masuk dalam Rencana Kerja pembangunan daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2021 antara lain peningkatan jalan provinsi yaitu ruas Jalan Tumbang Titi-Tanjung, Tanjung-Marau, Marau-Air Upas,

Air Upas-Manis Mata. Selain itu, ruas Jalan Simpang Sungai Gantang-Teluk Batu, Teluk Batu-Simpang Jemaya juga menjadi prioritas pembangunan pada tahun depan.

"Dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas antar wilayah kecamatan, termasuk konektivitas dengan jalan nasional dan antar provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah kita juga akan melakukan pembangunan dan peningkatan ruas Jalan Jambi Sukaramai," sambungnya.

Selain itu ada juga pembangunan pengaman pantai sepanjang pesisir Ketapang sebagai pelindung daerah pesisir dari abrasi tepatnya Ketapang-Pesaguan-Kendawangan.

Pembangunan Water Front City Sungai Pawan juga menjadi prioritas ren-

cana pembangunan di akhir masa kepemimpinan Martin Rantan-Suprpto S.

Martin juga menyampaikan komitmen Pemkab Ketapang untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

"Sebagaimana tuntutan dalam rencana aksi daerah yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kabupaten Ketapang saat ini telah menggunakan aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan aplikasi e-Budgeting," jelasnya.

Terintegrasinya kedua sistem tersebut, menurut Martin akan menuntut segenap pemangku kepentingan untuk patuh dan tertib dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. (nur)